

KONTRIBUSI PERBANKAN TERHADAP USAHA PERIKANAN DALAM PENYEDIAAN KREDIT MODAL USAHA

Irma Febrianty dan Erma Agusliani.

Staf Pengajar Pada Program Studi Agrobisnis Perikanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian: Mengetahui jenis-jenis perkreditan untuk usaha budidaya perikanan dan persyaratan yang diperlukan. Mengetahui permasalahan dalam penyaluran kredit perikanan dan besarnya dana yang dialokasikan untuk usaha perikanan. Menganalisis kontribusi sektor perbankan di usaha budidaya ikan berapa besar perbandingan modal sendiri dengan modal dari pihak perbankan dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banjar. Analisis yang digunakan untuk mengetahui jenis-jenis kredit dan syaratnya untuk usaha budidaya perikanan serta untuk mengetahui permasalahan dalam penyaluran kredit dan besarnya dana yang dialokasikan untuk usaha perikanan dilakukan dengan analisis deskriptif. Untuk mengetahui peranan sektor perbankan di usaha budidaya ikan berapa besar perbandingan modal sendiri dengan modal dari pihak perbankan dan berapa besar kontribusi perbankan dalam peningkatan penerimaan petani ikan dilakukan analisis tabulasi, prosentase dan analisis penerimaan serta pendapatan.

Hasil dari penelitian ini adalah Jenis-jenis kredit yang bisa diakses oleh petani ikan adalah: KUR (Kredit Usaha Perikanan), KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), Kredit BPD Peduli, Modal Usaha Kupedes BRI, BNI Wirausaha, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Kredit Program BNI), Mandiri Kredit Mikro, Kredit Pengembangan Usaha dan BPR dan Kredit Modal Kerja dari BPR.

Besarnya alokasi dana yang disediakan oleh perbankan untuk pengajuan kredit usaha perikanan berkisar antara Rp 500.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-. Perbandingan modal sendiri dari petani ikan dengan modal dari perbankan mencapai 20% - 80%. Pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan: Berdasarkan uji Wixcolson ada peningkatan pendapatan setelah menerima kredit dari perbankan dan besarnya peningkatan sebesar 7,6% - 31,94%.

Kata Kunci: kontribusi perbankan, terhadap usaha perikanan dalam penyediaan kredit modal usaha

I. PENDAHULUAN

Kendala yang dihadapi oleh pelaku perikanan antara lain terbatasnya modal yang mereka miliki dan sulitnya mencari tambahan modal. Akses perbankan sebagai penyedia kredit tidak bisa mereka jangkau. Disatu sisi dari pihak perbankan terkadang kesulitan menyalurkan kredit untuk sektor perikanan karena keterbatasan informasi yang diterima petani ikan dan kesulitan dari petani ikan untuk memenuhi persyaratan dari perbankan, oleh karena itu dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Belum banyak diketahuinya jenis perkreditan yang dapat diakses petani ikan dan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan kredit.
2. Apa saja kendala sektor perbankan dalam penyaluran kredit perikanan dan berapa besar alokasi dana yang sudah disalurkan.
3. Berapa besar kontribusi sektor perbankan dalam prosentase modal milik petani ikan dan pengaruhnya terhadap penerimaan petani ikan.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian:

1. Identifikasi jenis-jenis perkreditan untuk usaha budidaya perikanan dan persyaratan yang diperlukan.
2. Identifikasi permasalahan dalam penyaluran kredit perikanan dan besarnya dana yang dialokasikan untuk usaha perikanan.
3. Menganalisis kontribusi sektor perbankan di usaha budidaya ikan berapa besar perbandingan modal sendiri dengan modal dari pihak perbankan dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan.

Manfaat penelitian:

1. Bagi masyarakat perikanan sebagai bahan informasi bagi pemenuhan kebutuhan modal dari perbankan
2. Bagi perbankan untuk sosialisasi jenis-jenis kredit yang bisa diakses masyarakat ikan sehingga banyak kredit bisa disalurkan.
3. Bagi peneliti sebagai khasanah pengembangan pengetahuan di bidang perbankan dan usaha perikanan.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan tujuan penelitian, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga belum banyak diketahuinya jenis dan persyaratan kredit dari perbankan untuk petani ikan.
2. Diduga banyak permasalahan dalam penyaluran kredit usaha perikanan dari pihak perbankan
3. Diduga kredit perbankan memberikan kontribusi yang baik untuk petani ikan usaha budidaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes

atau yang dikenal sebagai banknote. Hasil penelitian Kurniawan Wahyu Febri (2011) yang berjudul Analisa Kredit Pada Pembudidaya Ikan Air Tawar Sebagai Parameter Pengambilan Keputusan Manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Blitar dari analisa data kebanyakan usaha budidaya ikan air tawar mengalami ketidaklayakan untuk jangka panjang akan tetapi untuk jangka pendek mereka sangat layak. Hal ini mungkin diakibatkan karena modal yang digunakan sangat besar dan hasil produksi sangat kecil. Sedangkan untuk usaha budidaya ikan hias sangat layak untuk dikembangkan karena personal yang sudah lama berkecimpung dalam usaha ini bertahun – tahun dan modal yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh sehingga mereka dalam pengembangan usahanya patut diberi kredit untuk meningkatkan produksi usaha.

Hasil penelitian dari A.Syamsu Hidayat dkk (2005) mengenai peranan lembaga keuangan dalam pengembangan usaha budidaya air tawar di Kabupaten Banjar yang memuat antara lain: Lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan usaha perikanan budidaya, terutama dalam penyediaan modal investasi dan modal kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga jenis pembudidaya ikan lebih memilih lembaga keuangan informal dalam pengembangan usahanya. Sedangkan lembaga keuangan formal hanya dipilih oleh sebagian pembudidaya.

METODE PENELITIAN

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten HSU. Dengan lembaga perbankan BRI dan Bank Kalsel di Kabupaten HSU dan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Banjar. Berdasarkan survei lapangan ketiga lembaga ini banyak menyalurkan kredit di bidang perikanan dan jangkauan pelayanannya sampai ke pelosok pedesaan tempat pelaku perikanan berusaha.

Responden dari petani ikan ditentukan dengan metode stratified random sampling diambil dari strata jenis usaha dimana petani ikan jaring apung/karamba pada Kabupaten HSU sebanyak 20 responden dan Kabupaten Banjar petani ikan kolam dan jaring apung sebanyak 30 responden. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara cermat dan faktual dari data yang telah terkumpul (Nazir, 2003).

HASIL PENELITIAN

1. Identifikasi jenis-jenis perkreditan untuk usaha budidaya perikanan dan persyaratan yang diperlukan

a. Jenis-jenis perkreditan untuk usaha budidaya perikanan

Jenis-jenis kredit yang bisa diakses oleh petani pembudidaya perikanan ada berbagai jenis dengan akses dari berbagai Bank antara lain bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jenis-jenis kredit dan Bank yang Menyalurkan

No.	Jenis Kredit	Bank Penyalur Kredit
1.	KUR (Kredit Usaha Rakyat)	BRI, Bank Kalsel, BNI, Mandiri, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri dan Bank BTN, Bank Nagari, Bank DKI, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, Bank DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua.
2.	KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi)	Bank Kalsel, BRI, Bank Mandiri
3.	Kredit BPD Peduli	Bank Kalsel
4.	Modal Usaha Kupedes BRI	BRI
5.	BNI Wirausaha	BNI 46
6.	Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Kredit Program BNI)	BNI 46
7.	Mandiri Kredit Mikro	Bank Mandiri
8.	Kredit Modal Kerja	BPR Martapura
9.	Kredit Pengembangan Usaha	BPR Martapura

Dari seluruh kredit pada Tabel 1. diatas yang peruntukkannya khusus ke usaha perikanan adalah KUR dan KKPE sedangkan kredit lainnya juga bisa diakses oleh usaha perikanan asalkan dapat memenuhi persyaratan yang dibuat pihak perbankan

b. Persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan kredit

b. 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR merupakan kredit modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp.500 juta termasuk KUR mikro (plafon sampai dengan Rp. 20 juta) yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif dan akan mendapat penjaminan dari perusahaan penjamin.

1) Persyaratan umum bagi calon debitur KUR bidang Kelautan dan Perikanan (KP):

- Individu/perorangan, kelompok dan koperasi dengan usaha di bidang KP yang layak (*feasible* tapi belum *bankable*).

- Tidak sedang menerima kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak menerima kredit program dari pemerintah
- Dapat sedang menerima kredit konsumtif (KPR, kredit kendaraan bermotor dll)

2) Persyaratan khusus:

(a) Debitur Perorangan:

- Surat keterangan berusaha
- Identitas (KTP, kartu keluarga)
- NPWP (untuk kredit di atas Rp.50 juta)
- Pengalaman di bidang usaha 1 tahun
- Fotocopy rekening bank selama 6 bulan terakhir
- Fotocopy bukti kepemilikan rumah tinggal/tempat usaha

(b) Debitur Kelompok

- Lokasi dan jenis usaha sama
- Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis
- Kelompok terdaftar pada dinas KP setempat
- Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif
- Mempunyai pengurus aktif minimal ketua, sekretaris dan bendahara
- Mempunyai aturan kelompok yang disepakati seluruh anggota
- Mempunyai pembukuan keuangan
- Membuat surat pernyataan tanggung renteng.

b.2. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disebut **bjb** KKPE adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bakar Nabati.

Sasaran Penerimaan KKP-E :

- Petani/peternak/pekebun/nelayan/pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok tani/kelompok usaha bersama/kelompok pembudidaya ikan
- Petani/peternak/pekebun/nelayan/pembudidaya ikan sebagai anggota koperasi
- Koperasi Primer dalam rangka pengadaan pangan

Kriteria

- Petani/Peternak/Pekebun/Nelayan/Pembudidaya Ikan

- Berusia paling rendah 21 tahun atau sudah menikah yang memiliki kegiatan usaha produktif minimal telah berjalan selama 1 tahun
- Menjadi anggota kelompok tani
- Bersedia mengikuti petunjuk Dinas Teknis atau Penyuluh Pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta **bjb** KKPE.
- Tidak sedang memperoleh fasilitas kredit program dari pemerintah
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia dan tidak terindikasi mempunyai kredit bermasalah baik sebagai perorangan, badan usaha atau pengurus.
- Tidak ada informasi negatif dan tidak sedang terlibat/menghadapi masalah hukum
- **Kelompok Tani**
- Telah terdaftar pada dinas teknis setempat.
- Mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai **bjb** KKPE
- Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif paling kurang ketua, sekretaris dan bendahara.
- Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota.
- **Koperasi**
- Berbadan hukum
- Memiliki pengurus yang aktif
- Memenuhi persyaratan bank teknis
- Memiliki anggota yang terdiri dari petani, peternak, pekebun dan nelayan
- Memiliki bidang usaha di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan atau pengadaan pangan

Persyaratan :

- Dokumen legalitas pemohon
- Mengisi formulir permohonan kredit

Kelengkapan Dokumen

- **Perorangan**
 - Fotokopi KTP Pemohon dan Istri/Suami bagi yang sudah berkeluarga
 - Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku
 - Fotokopi Surat Nikah Pemohon
 - Pas photo Pemohon beserta Istri/Suami (ukuran 3x4, 1 lembar)
 - Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan sebagai petani dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat

- Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa.

- **Kelompok Tani**

- Apabila kelompok tani bekerjasama dengan Mitra Usaha agar membuat kesepakatan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang bermitra.
- Surat tanda bukti terdaftar dari dinas teknis terkait
- Susunan pengurus Kelompok Tani yang aktif paling sedikit terdiri dari Ketua , Sekretaris dan Bendahara
- Surat kuasa dari anggota Kelompok Tani yang menunjuk Ketua Kelompok dari anggota

- **Koperasi**

- Surat pengesahan Badan Hukum Koperasi dari Instansi yang berwenang
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat kegiatan antara lain kegiatan usaha di sektor pertanian
- Daftar anggota yang terdiri dari petani
- *Copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) / identitas lainnya yang masih berlaku atas nama seluruh pengurus .
- *Copyseluruh* ijin atau legalitas usaha yang dimiliki dan masih berlaku
- *Copy* hasil Rapat Anggota Tahunan (minimal 2 periode terakhir) Serta penetapan Susunan Pengurus yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

b.3. Kredit BPD Peduli

Pengertian

Kredit BPD Peduli adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan untuk membantu para pengusaha mikro/golongan ekonomi lemah dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja.

Sasaran

Pengusaha mikro dan golongan ekonomi lemah.

Tujuan Penggunaan

Untuk meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat Kalimantan Selatan.

Plafond Kredit

Persyaratan Kredit

Mempunyai usaha yang jelas (bukan usaha baru).

Memiliki pengalaman pada sektor usaha yang akan dibiayai.

Tidak sedang menikmati fasilitas/ skim kredit lain.

Kemampuan menyediakan modal sendiri minimal sebesar 10 % dari kebutuhan modal kerja.

Kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Menyerahkan agunan sebesar minimal 100% dari plafon kredit untuk barang tidak bergerak minimal 150% dari plafon kredit untuk barang bergerak.

b.4. Modal Usaha Kupedes BRI

Kredit dengan bunga bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditujukan untuk individual (badan usaha maupun perorangan) yang memenuhi persyaratan dan dilayani diseluruh BRI Unit dan Teras BRI.

Persyaratan Modal Usaha Kupedes BRI

- Melampirkan legalitas usaha.

Minimal surat keterangan usaha dari kepala Desa / Lurah / Pasar.

- Pengalaman usaha minimal 1 tahun.

- Melampirkan dokumen identitas diri KTP / SIM

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia , 2011

Persyaratan Kredit kupedes:

- Keterangan surat ijin usaha
- Data Identitas lengkap calon nasabah peminjam (KTP)
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy surat nikah (bagi nasabah yang sudah menikah)
- Jaminan / Agunan
- Pas Foto 4 x 6 , milik suami maupun istri (bagi nasabah yang sudah menikah)

b.5. BNI Wirausaha

- Tambahan modal kerja usaha atau investasi usaha untuk usaha kecil produktif dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp. 50 juta s.d. Rp. 1 milyar.

Persyaratan:

- Legalitas usaha lengkap dan masih berlaku sesuai dengan bidang usahanya
- Fotokopi identitas diri dan bukti kepemilikan jaminan yang sah dan masih berlaku
- Fotokopi NPWP
- Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun
- Tidak termasuk dalam daftar hitam BI serta tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah
- Menyampaikan fotokopi rekening bank

b.6. Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Kredit Program BNI)

Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha mikro kecil dan koperasi (Program Kemitraan) melalui pemberian pinjaman untuk usaha produktif dalam bentuk modal kerja, maupun investasi kepada Mitra Binaan.

Persyaratan Perusahaan inti sebagai Avalis Murni

- Perusahaan inti adalah debitur BNI (segmen menengah/korporasi) dengan kolektibilitas lancar atau non debitur.
- Pengalaman usaha minimal 2 (dua) tahun.
- Tidak tercatat sebagai debitur bermasalah atau daftar hitam nasional.
- Kondisi laporan keuangan perusahaan selama 1 (satu) tahun terakhir menghasilkan keuntungan.
- NPWP dan Legalitas Usaha lengkap dan masih berlaku.
- Memiliki AMDAL
- Menyerahkan kebutuhan indikasi untuk 1 (satu) musim panen yang dikeluarkan oleh dinas terkait.

Persyaratan Petani/End User

- Petani mempunyai identitas diri (Pas photo, KTP, KK, Surat Nikah/Cerai)
- Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap).
- Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kades.
- Telah mendapat rekomendasi dari perusahaan inti (setuju mendapatkan fasilitas pinjaman dari BNI, setuju untuk menandatangani PK dan perjanjian lainnya, setuju untuk menjaminkan aset peternak/petani sebagai agunan kredit BNI, memberikan kuasa kepada perusahaan inti untuk menerima pencairan kredit dari BNI.
- WNI
- Lama 6 (enam) bulan terakhir (bila ada).

b.7. Mandiri Kredit Mikro

Menyediakan Kredit Usaha Mikro bagi Anda yang membutuhkan Kredit Investasi (KI) dan atau Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro.

Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan (seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan).

Kredit Usaha Mikro (KUM) terdiri atas 2 jenis produk kredit :

1. KUM (Kredit Usaha Mikro)

Kredit Usaha Mikro khusus diberikan kepada Usaha Mikro dengan maksimum limit kredit sebesar Rp 100 juta. Khusus untuk fasilitas top up diperkenankan sampai dengan limit Rp 200 juta.

2. KSM (Kredit Serbaguna Mikro)

Untuk pembiayaan berbagai macam keperluan (serbaguna), selama tidak melanggar kesucilaan, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum dengan maksimum limit kredit sebesar Rp.50 Juta.

Persyaratan Calon Debitur

1. Kredit Usaha Mikro (KUM)

- o Usaha minimum 2 tahun di lokasi dengan bidang usaha yang sama.
- o Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Maksimal usia 60 tahun saat kredit lunas.
- o Melampirkan bukti diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Surat Nikah (bagi yang menikah).
- o Khusus kredit Rp 50 juta keatas dipersyaratkan NPWP.
- o Surat Keterangan Usaha dari Desa /Kelurahan, Dinas Pasar atau Otorita setempat dimana yang bersangkutan memiliki usaha ; atau
- o Surat Ijin Usaha.
- o Belum pernah memperoleh fasilitas kredit atau pernah / telah memperoleh fasilitas kredit dengan kolektibilitas Lancar atau tidak dalam kondisi kredit bermasalah.

2. Kredit Serbaguna Mikro (KSM)

- o Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.
- o Telah diangkat menjadi pegawai tetap minimal 1 (satu) tahun dan berpenghasilan tetap. Khusus untuk pegawai dengan status tetap (tidak termasuk masa percobaan/ probation) dan payroll di Bank maka masa kerja pegawai tidak diperhitungkan.
- o Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan pada saat kredit lunas sesuai usia pensiun yaitu maksimum 55 tahun (kecuali untuk pegawai Pemerintah / BUMN/ BUMD/ BHMN/ persyaratan usia ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- o Penghasilan per bulan diatas Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di daerah tersebut.
- Menyerahkan bukti diri berupa copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon debitur dan suami/istri calon debitur, Kartu Keluarga (KK) serta Surat Nikah/Cerai (bagi yang

b.8. Kredit Modal Kerja (BPR)

Kredit ini diberikan oleh BPR untuk mengembangkan usaha khususnya untuk usaha mikro yang bisa diakses oleh semua jenis usaha termasuk usaha budidaya ikan.

Persyaratan dan Dokumen Pendukung:

1. Usaha berjalan minimal 2 tahun
2. Pas foto suami isteri ukuran 3x4 masing-masing 1 (satu) lembar
3. copy KTP (suami/isteri), Kartu Keluarga, Kartu Nikah (yang sudah menikah) 2 (dua) lembar.
4. Surat keterangan usaha dari Kelurahan (SIUP/SITU)
5. Agunan berupa : (BPKP Motor/Mobil dan Kwitansi pembelian yang belum atas nama dan atau SHM/Sertifikat tanah rumah atas nama pemohon)
6. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir.

b.9. Kredit Pengembangan Usaha (BPR)

Kredit yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha yang sudah ada berupa modal kerja tambahan yang diberikan kepada usaha perorangan.

Persyaratan:

1. Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
2. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan
3. Agunan (BPKP motor/mobil atau sertifikat)
4. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir
5. Pas photo berwarna 3x4 2 (dua) lembar
2. **Identifikasi permasalahan dalam penyaluran kredit perikanan dan besarnya dana yang dialokasikan untuk usaha perikanan.**

2a. Identifikasi permasalahan dalam penyaluran kredit perikanan

Permasalahan dalam penyaluran kredit perikanan dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi perbankan dan dari sisi petani ikan sendiri.

a. Perbankan

Dari hasil identifikasi yang berasal dari wawancara dengan pihak perbankan maka diperoleh permasalahan sebagai berikut:

1. Kebanyakan petani ikan yang mengajukan kredit tidak mempunyai agunan/jaminan yang cukup, pihak perbankan tidak bisa menerima agunan tanah yang hanya disertai surat keterangan tanah saja tidak berupa surat berharga seperti: surat sertifikat dan surat segel.
2. Pada umumnya petani ikan belum memiliki legalitas harta yang dimiliki sebagai agunan
3. Besarnya kredit macet untuk skala kecil bisa mencapai 50%

4. Besarnya resiko usaha perikanan, terutama pengaruh cuaca dan kualitas air yang sangat berpengaruh terhadap usaha perikanan.
5. Pembayaran kredit pada saat panen, karena produksi budidaya ikan memerlukan waktu 3-4 bulan untuk panen.

Permasalahan yang dihadapi oleh petani ikan dalam pengajuan kredit cukup beragam antara lain:

1. Kebanyakan petani tidak mempunyai agunan yang disyaratkan oleh perbankan, walaupun mereka memiliki harta seperti tanah tetapi legalitas kepemilikan tanah yang tidak mereka miliki, kebanyakan surat tanah mereka hanya berupa surat keterangan tanah saja yang legalitasnya masih rendah dan tidak bisa diterima oleh perbankan.
2. Kebanyakan petani belum membuat pembukuan usaha yang baik yang diperlukan dalam pengajuan kredit.
3. Masih kurang mampunya petani ikan membuat analisa usaha yang dimilikinya.
4. Pembayaran kredit dalam perbulan memberatkan petani ikan karena penghasilan petani ikan pada saat panen yang memerlukan waktu 3-6 bulan.
5. Ketidakmampuan petani ikan untuk membayar angsuran karena usaha budidaya ikan mempunyai resiko tinggi.
6. Belum tersosialisasinya dengan baik kredit perbankan yang dapat diakses oleh petani ikan.

2b. Besarnya alokasi dana dari perbankan untuk usaha perikanan

Besarnya dana yang dialokasikan oleh perbankan berbeda-beda setiap bank tergantung dari skim kredit yang diajukan, hal ini dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dana yang dialokasikan untuk KUR Mikro (plafond kredit di bawah Rp. 20 juta) dan KUR *Linkage* (plafond kredit Rp. 20-500 juta).

2. KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi)

Kredit yang diberikan maksimal sebesar Rp 50.000.000,00 , untuk petani, peternak, pekebun, nelayan dan pembudidaya ikan, yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan Indikator.

Kredit yang diberikan untuk kelompok tani maksimal sebesar Rp 500.000.00 dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan.

3. Kredit BPD Peduli

Alokasi dana yang diberikan untuk kredit BPD Peduli adalah sebesar Maksimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 10 juta untuk agunan segel dan sejenisnya.

4. Modal Usaha Kupedes BRI

Alokasi dana yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan kredit Modal Usaha Kupedes BRI batas pinjaman maksimal 100 jt & bunga 1,2 % flat.

5. BNI Wirausaha

Tambahan modal kerja usaha atau investasi usaha untuk usaha kecil produktif dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp. 50 juta s.d. Rp. 1 milyar.

6. Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Kredit Program BNI)

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BNI menyalurkan dana pinjaman untuk sektor pertanian dengan total dana keseluruhan sebesar Rp 18,371,916,663,-

7. Mandiri Kredit Mikro

Kredit Usaha Mikro khusus diberikan kepada Usaha Mikro dengan maksimum limit kredit sebesar Rp 100 juta. Khusus untuk fasilitas top up diperkenankan sampai dengan limit Rp 200 juta.

8. Kredit Modal Kerja (BPR)

Besarnya kredit yang diberikan berkisar antara Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 25.000.000,- dengan jangka waktu peminjaman 36 bulan.

9. Kredit Pengembangan Usaha (BPR)

Besarnya kredit yang diberikan sebesar Rp 2.500.000 sampai dengan Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu peminjaman 24 bulan.

3. Kontribusi sektor perbankan di usaha budidaya ikan perbandingan modal sendiri dengan modal dari pihak perbankan dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan

Responden petani ikan tidak semuanya mengajukan kredit ke perbankan dari seluruh responden yang berjumlah 50 orang hanya 18 orang yang saat ini memperoleh kredit dari perbankan hal ini disebabkan beberapa hal antara lain:

- Sebagian petani ikan dapat memenuhi sendiri modal yang diperlukan untuk usaha mereka.
- Kesulitan dalam memenuhi persyaratan perbankan seperti adanya agunan surat berharga berupa sertifikat, segel tanah, BPKB dll.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil analisa data penelitian maka dapat diambil kesimpulan dan penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis-jenis kredit yang bisa diakses oleh petani ikan adalah: KUR (Kredit Usaha Perikanan), KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit BPD Peduli, Modal Usaha Kupedes BRI, BNI Wirausaha, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Kredit Program BNI, Mandiri Kredit Mikro, Kredit Pengembangan Usaha dari BPR dan Kredit Modal Kerja dari BPR.

Persyaratan umum yang diperlukan petani ikan untuk mengajukan kredit perorangan antara lain: Surat keterangan berusaha, Identitas (KTP, kartu keluarga), NPWP (untuk kredit di atas Rp.50 juta) , Pengalaman di bidang usaha 1 tahun, Fotocopy rekening bank selama 6 bulan terakhir, Fotocopy bukti kepemilikan rumah tinggal/tempat usaha , Fotokopi Surat Nikah Pemohon, Pas photo Pemohon beserta Istri/Suami (ukuran 3x4, 1 lembar) dan apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa.

Persyaratan untuk kelompok tani antara lain: Lokasi dan jenis usaha sama, Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis, kelompok terdaftar pada dinas KP setempat, mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif , mempunyai pengurus aktif minimal ketua, sekretaris dan bendahara, mempunyai aturan kelompok yang disepakati seluruh anggota, mempunyai pembukuan keuangan, membuat surat pernyataan tanggung renteng dan surat kuasa dari anggota Kelompok Tani yang menunjuk Ketua Kelompok dari anggota

2. a. Permasalahan dalam penyaluran kredit

Dari sisi perbankan: Pada umumnya masyarakat belum memiliki legalitas harta yang dimiliki sebagai agunan. Besarnya kredit macet untuk skala usaha kecil mencapai 50%, besarnya resiko usaha perikanan , dan pembayaran kredit pada saat panen ikan.

Dari sisi petani ikan: Kebanyakan tidak bisa memenuhi agunan/jaminan yang disyaratkan perbankan, pembukuan dan analisa usaha yang masih kura, pembayaran angsuran kredit per bulan, dan besarnya resiko usaha perikanan.

- b. Besarnya alokasi dana yang disediakan oleh perbankan untuk pengajuan kredit usaha perikanan berkisar antara Rp 500.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-

3. a. Perbandingan modal sendiri dengan modal dari perbankan mencapai 20% - 80%

- b. Pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan : Berdasarkan uji Wixcolson ada peningkatan pendapatan setelah menerima kredit dari perbankan dan besarnya peningkatan sebesar : 7,6% - 31,94%

b. **Saran**

Dari hasil penelitian ini untuk menghubungkan penyaluran kredit dari perbankan dan petani ikan yang membutuhkan kredit dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang lebih optimal dari pihak perbankan mengenai jenis kredit dan persyaratannya yang dapat diakses petani ikan dengan bantuan Perguruan Tinggi dalam Tri Dharmanya.
2. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai perlunya legalitas dari harta yang mereka miliki.
3. Pembelajaran masyarakat oleh Perguruan Tinggi mengenai manajemen usaha dan analisa usaha yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Syamsu Hidayat, Erma Agusliani, 2009. Peranan lembaga keuangan dalam pengembangan usaha budidaya air tawar di Kabupaten Banjar Jurnal Delegasi ISSN: 1829-6866, April 2009.
- Bank Sentral Kajian www.rakyatmerdeka online.com/news.php?id=43782. 27 Oktober 2013.
- Pikiran Rakyat online www.pikiran-rakyat.com/node/226256. 9 Maret 2013.
- Pengertian bank.id.wikipedia.org/wiki.bank. 4 April 2013
- Kurniawan Wahyu Febri (2011). Minor Tesis. Analisa Kredit Pada Pembudidaya Ikan Air Tawar Sebagai Parameter Pengambilan Keputusan Manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Blitar. <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/23010> Appears in collection.
- Moeleong, L.J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Singarimbun, M dan Effendi, S. 1981. Metode Penelitian Sirvei. LP3S. Jakarta.